

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara – negara maju yang memiliki praktik akuntansi yang kompleks kebutuhan terhadap publikasi informasi keuangan merupakan suatu keniscayaan. Bahkan tanpa harus dipaksa institusi bisnis maupun publik secara suka rela bersedia menyajikan laporan keuangan dan mengungkapkan informasi penting yang terkait dengan organisasi kepada pemangku kepentingan. Namun, sayangnya hingga saat ini masih ada sebagian masyarakat kita yang memiliki anggapan bahwa laporan keuangan hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki pengetahuan akuntansi atau keuangan saja. Sementara itu, masyarakat pembaca laporan keuangan yang berlatar belakang akuntansi tidak merasa bahwa laporan keuangan tersebut juga diperuntukkan bagi mereka<sup>2</sup>.

Hingga saat ini masih ada sebagian masyarakat yang memiliki anggapan bahwa laporan keuangan hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki pengetahuan akuntansi atau keuangan saja. Sementara itu, masyarakat pembaca laporan keuangan yang berlatar belakang akuntansi tidak merasa bahwa laporan keuangan tersebut juga diperuntukkan bagi mereka.<sup>3</sup>Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi daerah otonom. Kewenangan pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan

---

<sup>2</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019).

<sup>3</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi keempat* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019), Hal. 1

urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya sesuai dengan sistem Negara Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>4</sup>.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat laporan keuangan daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu, dan dapat diandalkan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya dan tidak mengandung unsure manipulasi. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi – informasi yang dapat mempengaruhi keputusan<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> JDIH BPK RI, “Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014,” accessed June 27, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

<sup>5</sup> JDIH BPK RI.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan<sup>6</sup>.

peraturan perundang-undangan Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran Analisis kinerja pemerintah daerah setiap daerah memiliki hasil yang beragam dari yang maksimal sampai kurang maksimal. Jika kinerja keuangannya maksimal maka dapat mendukung perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Namun, jika kinerja keuangannya Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kurang maksimal dapat berpengaruh juga terhadap perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat<sup>7</sup>.

kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada, masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak – pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik Banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan

---

<sup>6</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

<sup>7</sup> Mahmudi.

keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan publikasian tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan

Keunikan dari judul yang saya ambil mengenai kinerja keuangan daerah adalah karena judul ini menawarkan pendekatan dan metode analisis yang inovatif dan relevan yaitu pendekatan Kuantitatif dengan metode deskriptif atau dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh Kewenangan pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya sesuai dengan sistem Negara Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>8</sup>.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan

---

<sup>8</sup> JDIH BPK RI, “Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014.”

pendapatan daerah, dan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya<sup>9</sup>.

Sujarweni (2017) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu dilakukan penilaian/pengukuran secara periodik. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dapat menggunakan sistem penilaian (rating) yang relevan. Untuk mengetahui seberapa baik dan besarnya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan dimasa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada<sup>10</sup>.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi daerah otonom. Kewenangan pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya sesuai dengan sistem Negara Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>9</sup> Anike Deswira, “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah : Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar,” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 17, no. 1 (2022): 72–88, <https://doi.org/10.30630/jam.v17i1.181>.

<sup>10</sup> Jougogo Abdullah and Indah Zakiyah, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Periode Tahun 2017-2021,” *Jurnal Manajemen* 6, no. 2 (2022): 602.

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Penjelasan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka perlu juga menetapkan peraturan pemerintah daerah pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Kediri dalam mengelola keuangan daerah membentuk organisasi dan tata kerja perangkat daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Menurut Permandagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan yaitu alasan internal

dan eksternal. Alasan internal yaitu laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit – unit kerja didalamnya dan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pagawai pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPRD. Sedangkan untuk alasan eksternal<sup>11</sup>.

Analisis laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang dianalisis disajikan dengan valid dan dapat diandalkan. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk artinya laporan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga di dalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian angka, tidak disusun dengan standar pelaporan, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi keempat (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019), Hal. 2 23 tepat waktu dalam penyampaiannya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri. Fungsi utama dari laporan keuangan daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu, dan dapat diandalkan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya dan tidak mengandung unsure manipulasi. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi – informasi yang dapat mempengaruhi keputusan

---

<sup>11</sup> Siregar and Mariana, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat).”

Melakukan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menghasilkan informasi yang sangat penting dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah serta secara tidak langsung juga dapat menilai keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan ialah jumlah pendapatan yang diperoleh dan jumlah belanja. Jika pendapatan daerah yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah belanja maka kinerja keuangan dapat dikatakan berjalan dengan maksimal. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah pendapatan daerah yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan jumlah belanja yang dikeluarkan maka kinerja keuangan dikatakan kurang maksimal dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat<sup>12</sup>. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana berimbang, dan lain – lain PAD yang sah, kemudian pendapatan daerah tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar

---

<sup>12</sup> JDIH BPK RI, “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,” accessed March 7, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>.

semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui membayar pajak daerah hingga membayar retribusi daerah.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ketergantungan daerah terhadap TKDD masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%. Ketergantungan fiskal terhadap pusat justru lebih parah terjadi pada pemerintah daerah kota/kabupaten. Padahal, level kota/kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ironisnya lagi dominasi transfer dari pusat tidak diikuti dengan perbaikan pengelolaannya (governance)<sup>13</sup>. Kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerahh serta secara tidak langsung juga dapat menilai keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu

pertama, rasio desentralisasi yaitu dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Penerimaan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah.

---

<sup>13</sup> Detiknews, "Desentralisasi Dan Ketergantungan Fiskal Daerah," accessed November 27, 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-4406834/desentralisasi-danketergantungan-fiskal-daerah>.

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Rasio efektivitas Penerimaan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (dianggarkan).

Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

rasio keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja operasi ialah analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah, dan belanja modal ialah belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah<sup>14</sup>.

Anim Rahmayati<sup>15</sup> merupakan penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio DCSR. Metode analisis data menggunakan analisis rasio keuangan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif.

---

<sup>14</sup> Detiknews.

<sup>15</sup> Anim Rahmayati, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013," *Jurnal Eka Cida* 1, no. 1 (2024): 40–54.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah memiliki pembahasan yang sama dan sama – sama menggunakan metode kuantitatif dengan sumber observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah rasio yang digunakan dalam menganalisa kinerja keuangan penelitian ini menambahkan rasio pertumbuhan dan rasio DCSR. Tahun yang digunakan peneliti juga terbaru. efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah memiliki pembahasan yang sama dan sama – sama menggunakan metode kuantitatif dengan sumber observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah rasio yang digunakan dalam menganalisa kinerja keuangan penelitian ini menambahkan rasio pertumbuhan dan rasio DCSR. Tahun yang digunakan peneliti juga terbaru<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Rahmayati.

Penelitian Arthaingan H.Mutiha<sup>17</sup> tujuan adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor selama lima tahun terakhir (2010-2014). Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan rata-rata kinerja pengelolaan kota Bogor berdasarkan rasio keuangan adalah baik. Pola hubungan kemandirian daerah kota Bogor dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola hubungan konsultatif. Sementara itu efektivitas keuangan daerah kota Bogor cukup baik atau efektif. Porsi belanja tidak langsung terhadap total pendapatan relatif lebih besar dibandingkan porsi belanja langsung terhadap total pendapatan. Sementara itu pertumbuhan pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang positif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah memiliki pembahasan yang sama dan sama – sama menggunakan metode kuantitatif dengan sumber observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah rasio yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan penelitian ini menambahkan rasio belanja langsung, belanja tidak langsung, dan rasio pertumbuhan. Tahun yang digunakan peneliti juga terbaru serta tempat yang diteliti juga berbeda<sup>18</sup>.

Dari penjelasan diatas alasan peneliti melakukan penelitian penting dilakukan untuk untuk menunjukkan kepada masyarakat bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kediri dilaksanakan dan menunjukkan bahwa laporan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kediri transparansi. Transparansi yang dimaksud ialah pemerintah daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat. Selain itu, pengukuran kinerja untuk

---

<sup>17</sup> Arthaingan H Mutiha, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014," *Jurnal Vokasi Indonesia* 4, no. 2 (2024): 106, <https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.101>.

<sup>18</sup> Mutiha.

kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Penelitian ini peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri dengan pengelolaan pemerintah daerah lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas masalah

## **B. Identifikasi Masalah**

Ada masalah politis saat berbicara mengenai prioritas alokasi dan masalah ekonomi ketika bicara sumber pendanaannya. Menganalisa keuangan di Indonesia mengungkapkan beberapa permasalahan di bidang keuangan daerah yang dihadapi beberapa pemerintah daerah selama ini, khususnya pada Pendapatan Keuangan Kabupaten Kediri yaitu:

- a) Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah.
- b) Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah.
- c) Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada.
- d) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Hasil analisis rasio keuangan dalam penelitian ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, melihat kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, melihat kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, melihat kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan melihat kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Pajak Daerah terhadap PAD. Dengan digunakannya analisis keuangan tersebut maka akan memberikan suatu hasil perbandingan kinerja keuangan dari tahun tahun sebelumnya, di mana nantinya akan menggambarkan kondisi Kinerja Keuangan pada Kabupaten Kediri<sup>19</sup>.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu:

- a) Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri jika dilihat dari Rasio Desentralisasi?
- b) Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri jika dilihat dari Rasio Kemandirian?
- c) Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD?
- d) Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri jika dilihat dari Rasio Efisien PAD?
- e) Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri jika dilihat dari Rasio Ketergantungan?

---

<sup>19</sup> Abdul Halim, *Akutansi Sektor Publik: Akutansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

- f) Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri jika dilihat dari Rasio Keserasian?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui.

- a) Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri jika dilihat dari Rasio Desentralisasi.
- b) Untuk mengetahui Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri jika dilihat dari Rasio Kemandirian.
- c) Untuk mengetahui Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
- d) Untuk mengetahui Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri jika dilihat dari Rasio Efisien PAD.
- e) Untuk mengetahui Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri jika dilihat dari Rasio Ketergantungan.
- f) Untuk mengetahui Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri jika dilihat dari Rasio Keserasian.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Manfaat teoretis dari penelitian ini ialah dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam penegloalan keuangan daerah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a) Bagi Pemerintah Kabupaten Kediri

Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

b) Bagi Akademik

Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung.

c) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan kerangka bagi penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## **F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian, agar lebih efektif serta efisien dan penelitian sehingga peneliti dapat memisahkan aspek tertentu dengan objek yang diteliti. Sedangkan batasan masalah adalah upaya untuk menetapkan ruang lingkup penelitian. Batasan masalah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang termasuk ruang lingkup masalah serta apa saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Berdasarkan identifikasi tersebut peneliti memberi batasan masalah yang diteliti agar lebih spesifik yaitu mengenai empat variabel terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2019-2023 Variabel bebas dalam penelitian adalah rasio keuangan. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2019 – 2023

2. Keterbatasan Penelitian Berdasarkan ruang lingkup penelitian diatas, maka peneitian ini menggunakan data langsung dari Kabupaten Kediri. Penelitian ini hanya dibatasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 20219 - 2023

## **G. Penegasan Istilah**

### 1. Definisi Konseptual

#### a) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran<sup>20</sup>.

#### b) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat<sup>21</sup>.

#### c) Pengelolaan keuangan daerah

Pengeloaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> BPKAD Kabupaten Banjar, "Kinerja Keuangan Daerah," accessed November 22, 2021, <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/07/kinerja-keuangandaerah/>.

<sup>21</sup> Nur Fadhila Amri, "Mengenal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)," n.d.

<sup>22</sup> JDIH BPK RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019."

d) Akuntansi pemerintah daerah

Akuntansi pemerintah daerah merupakan kumpulan dari subsistem – sistem yang didalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap – tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah

e) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda<sup>23</sup>.

f) Analisis Rasio Keuangan

1. Rasio Desentralisasi Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Penerimaan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi

---

<sup>23</sup> JDIH BPK RI, “Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014.”

angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya<sup>24</sup>.

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Rasio efektivitas Penerimaan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (dianggarkan)
4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah
5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi
6. Rasio Keserasian Belanja
  - a. Belanja Operasi Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehinggabelanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.
  - b. Belanja Modal Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

---

<sup>24</sup> JDIH BPK RI.

7. Definisi Operasional Dari definisi konseptual di atas, penelitian yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kediri yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Penelitian ini untuk menguji apakah teori yang sudah dijelaskan di atas dapat dibuktikan secara ilmiah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan dari masalah penelitian tersebut, tujuan dari penelitian, kegunaannya, ruang lingkup serta keterbatasan penelitian, dan juga definisi operasional. Pada bab I menjelaskan tentang garis besar dan pembahasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan yang berkaitan dengan deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual/kerangka berfikir penelitian dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan yang berkaitan dengan pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran teknik pengumpulan data, dan analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan hasil analisis data.

#### **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan yang berkaitan dengan pembahasan data penelitian dan hasil data.

#### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran – lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup